

Faktor Domestik Ethiopia Meratifikasi Nile Basin Cooperative Framework Agreement (CFA) tentang Manajemen Redistribusi Aliran Sungai Nil Tahun 2013

Sartika Tandirerung – 071012045

Program Studi S1 Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

ABSTRACT

Nile Basin CFA is the first multilateral agreement which is involved both upstream and downstream countries of Nile Basin. On 14 May 2010, Ethiopia with four countries, Uganda, Kenya, Rwanda and Tanzania signed the CFA. After three years of ratification process was opened, Ethiopia becomes the first country who ratified this agreement on 13 June 2013. This shows the position of Ethiopia lead another countries in Nile Basin. Thus, it's needed to research factors that caused Ethiopia ratified Nile Basin CFA while most of the countries in Nile Basin have not ratified yet. This study use domestic level of analysis, rational choice theory which is related to national interest and benefit types from multilateral agreement in Nile Basin. The range of this study is taken between 1997 and 2013. This study results, there are two main domestic factors of caused Ethiopia ratified Nile Basin CFA. First, domestic actors have been active in some negotiation in Nile Basin; Second, domestic condition like economic needs.

Keywords: *Ethiopia, Nile Basin CFA, ratification, active participation, economic needs.*

Nile Basin CFA adalah hasil dari kerjasama multilateral pertama yang melibatkan negara hulu dan hilir Lembah Sungai Nil. Pada tanggal 14 Mei 2010, Ethiopia dengan empat negara hulu yakni Uganda, Kenya, Rwanda dan Tanzania menandatangani CFA. Setelah tiga tahun proses ratifikasi dibuka, Ethiopia menjadi negara pertama yang meratifikasi pada tanggal 13 Juni 2013. Dengan demikian, perlu diteliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan Ethiopia meratifikasi Nile Basin CFA sementara negara Lembah Sungai Nil sebagian besar belum melakukannya. Peneliti menggunakan level analisis domestik, rational choice theory yang dikaitkan dengan kepentingan nasional dan jenis keuntungan yang diperoleh dari kerjasama untuk menjelaskan faktor-faktor tersebut. Penelitian ini dilakukan pada rentang tahun 1997-2013, yang menghasilkan bahwa terdapat dua faktor domestik utama yang mendorong Ethiopia meratifikasi Nile Basin CFA yaitu: pertama, peran aktif yang sudah dilakoni oleh aktor-aktor domestik dalam negosiasi-negosiasi Nile Basin CFA; kedua, kondisi domestik berupa kebutuhan ekonomi.

Kata-Kata Kunci: *Ethiopia, Nile Basin CFA, ratifikasi, peran aktif, kebutuhan ekonomi.*

Ethiopia meratifikasi *Nile Basin Cooperative Framework Agreement* (CFA) atau disebut *Entebbe Agreement* pada tanggal 13 Juni 2013. *Nile Basin CFA* adalah hasil negosiasi multilateral pertama yang melibatkan negara hulu dan hilir di memengaruhi Sungai Nil. Diratifikasinya CFA menjadi langkah signifikan menuju realisasi distribusi yang adil terhadap pemanfaatan aliran Sungai Nil.¹ Penyusunan kerangka CFA sudah dimulai sejak tahun 1997 melalui *Cooperative Framework Project*. Konsep CFA kemudian pertama kali disampaikan pada pertemuan Nile-COM di Entebbe, Uganda pada bulan Juni 2007.² Negosiasi CFA ini dilakukan pada tingkat kementerian perairan negara-negara memengaruhi Sungai Nil (Nile-COM) yang berlangsung selama 10 tahun (1999-2010).

Pembahasan konsep CFA dilanjutkan pada pertemuan Nile-COM di Kinshasa, Kongo pada Juli 2008 namun tetap tidak menyelesaikan pasal 14b yang menjadi perdebatan antara negara hulu dan hilir tentang kuota air yang dikhawatirkan mengganggu kuota air Mesir sebelumnya.³ Pada 27-28 Juli 2009 dihasilkan kesepakatan untuk memberikan tambahan jangka waktu selama 6 bulan penyelesaian perdebatan pasal 14b untuk persiapan melangkah pada tahap penandatanganan.⁴ Namun permasalahan dalam pasal tersebut belum terselesaikan sehingga pada tanggal 14 Mei 2010 hingga 14 Mei 2011 dijadikan sebagai jangka waktu bagi negara-negara Sungai Nil untuk tetap menandatangani CFA. Terdapat enam negara yang telah menandatangani CFA, yaitu Ethiopia, Uganda, Kenya, Rwanda, Tanzania disusul oleh Burundi pada tahun 2011.⁵ Secara geografis, Sungai Nil mengalir dari utara ke selatan melewati Tanzania, Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya, Kongo, Ethiopia, Sudan, Sudan Selatan, Eritrea dan Mesir.⁶ Ethiopia memiliki kontribusi besar atas aliran air Sungai Nil yang berasal dari Danau Tsana mengalir hingga ke Sungai Nil besar.

¹ "The Ethiopia Parliament Ratifies the Nile Basin Cooperative Framework Agreement (Jun 13, 2013)", *Ministry of Foreign Affairs FDRE Website*, 13 Juni 2013, <http://www.mfa.gov.et/news/more.php?newsid=2120> (diakses 6 Desember 2013)

² Dereje Zeleke Mekonnen, "The Nile Basin Cooperative Framework Agreement Negotiations and the Adoption of a 'Water Security' Paradigm: Flight into Obscurity or a Logical Cul-de-sac?" *The European of International Law Vol. 21 no.2*, 2010, www.ejil.org/pdfs/21/2/2014.pdf (diakses 9 Desember 2013), 428

³ Dereje Zeleke Mekonnen, 428

⁴ Yacob Arsano, *Ethiopia and the Nile: dilemmas of national and regional hydropolitics* (2007)

⁵ "The Nile Cooperative Framework Agreement Proclamation Sent to Parliament for Ratification", *Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Stockholm, Sweden*, 12 Juli 2013, <http://ethemb.se/beta/a/the-nile-cooperative-framework-agreement-proclamation-sent-to-parliament-for-ratification-apr-09-2013/> (diakses 6 Desember 2013)

⁶ Kidane Kiros Bitsue, "The Nile From mistrust and sabre rattling to rapprochement", *Institute for Security Studies Paper* 238 (September 2012), <http://www.issafrica.org/uploads/Paper238.pdf> (diakses 8 Desember 2013), 1

Tabel 1. Persentase Kontribusi Aliran Air Sungai Nil

Contribution to Nile flows			
		Annual (average)	Flood period (average)
Eastern Nile Basins (from Ethiopia)	Blue Nile	59%	68%
	Tekezze/ Atbara	14%	5%
	Baro-Akobo/ Sobat	13%	22%
	Total Ethiopia	86%	96%
Equatorial Nile Basin	White Nile	14%	5%

(<http://www.slideshare.net/ana.cascao/nile-hydropolitics-in-the-nile-basin-aalto-university>)

Secara khusus, Ethiopia termasuk salah satu negara termiskin di Afrika dengan *Gross National Income* (GNI) yang hanya sekitar 971 dollar, jauh tertinggal dari negara Sub-Sahara Afrika.⁷ Sementara itu, Ethiopia terus mengalami kekeringan jangka panjang yang disebabkan oleh ketidakmerataan distribusi sumber daya air dan keterbatasan ketersediaan finansial dan sumber daya teknis.⁸ Namun kehadiran CFA mengundang pertanyaan besar terkait walaupun negara-negara hilir dengan tegas menyatakan tidak akan menandatangani CFA namun negara-negara hulu tetap melangkah pada proses penandatanganan dan ratifikasi, khususnya Ethiopia yang mengawali tahap penandatanganan dan ratifikasi.⁹ Pertimbangan domestik seperti perilaku aktor domestik dalam negosiasi multilateral dan kebutuhan ekonomi menjadi dua faktor utama yang mendorong Ethiopia untuk meratifikasi CFA. Pertimbangan tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan dalam kebijakan luar negeri, rasionalitas pengambilan kebijakan yang dihubungkan dengan kepentingan nasional dan jenis keuntungan kerjasama yang didapatkan.

⁷ Tenna Shiterek, "Ethiopia Country Report", Mei 2012

⁸ Tenna Shiterek, "Ethiopia Country Report", Mei 2012

⁹ Abadir M. Ibrahim, "The Nile Basin Cooperative Framework Agreement: The Beginning of the End of Egyptian Hydro-Political Hegemony", *Environmental Law and Policy review*, vol. 18, no 2, 20

**Kebijakan Luar Negeri, Rasionalitas dan Kepentingan
Nasional Ethiopia Meratifikasi Nile Basin Cooperative
Framework Agreement (CFA)**

Kebijakan luar negeri menunjukkan tingkat kepekaan atau keterlibatan suatu negara terhadap hal-hal eksternal yang disesuaikan dengan baik tujuan dalam maupun luar negerinya.¹⁰ Kebijakan luar negeri bermula dari munculnya tuntutan dari lingkungan domestik untuk merespon kondisi eksternal yang ada. Tuntutan ini oleh pembuat keputusan dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhi seperti faktor politik, ekonomi atau militer yang menghasilkan kebijakan luar negeri.¹¹ Snyder juga menyebutkan tentang kebijakan luar negeri yang berasal dari kombinasi antara aktor, alat dan situasi.

Faktor-faktor domestik dijelaskan melalui penggunaan level analisis. John Spanier menggolongkan tiga level analisis, yaitu: pertama, level internasional (*systemic*) yakni perilaku negara dalam mengambil keputusan ditentukan oleh signifikansi peran negara tersebut atau karena perilaku negara lain dalam sistem internasional; kedua, level negara-bangsa (*nation-states*) didasarkan pada kondisi domestik suatu negara berupa sistem politik negara-bangsa, kondisi ekonomi dan karakteristik masyarakatnya; dan ketiga, level pembuatan keputusan (*decision making*) yang lebih melihat bahwa perilaku negara ditentukan oleh sekelompok elit yang berwenang.¹² Faktor domestik lebih mampu menjelaskan perilaku kebijakan luar negeri karena terdapat kausalitas sifat atau perilaku yang lebih dekat dengan pembuat kebijakan seperti lembaga politik, struktur ekonomi, budaya atau karakteristik kepemimpinan.¹³

Teori pilihan rasional atau *rational choice theory* (RCT) merupakan teori yang berasal dari pandangan ekonomi mikro untuk menjelaskan perilaku ekonomi suatu unit yang dipengaruhi oleh faktor harga, pasar dan permintaan.¹⁴ Pada level domestik, secara spesifik terdapat aktor-aktor yang memiliki peran dalam mengarahkan kebijakan dan

¹⁰ K.J Holsti. *Politik Internasional, Kerangka untuk Analisis*. (Jakarta: Erlangga, 1988), 108

¹¹ William D Coplin, *Introduction to International Politics: A Theoretical Overview*, (Boston: Markham Publication, 1980)

¹² John Spanier, *Games Nations Play: Analyzing International Politics*, (New York: Congressional Quarterly, 1981)

¹³ J.D Fearon (1998) dalam Aileen S.P. Baviera, "The Influence of Domestic Politics on Philippines Foreign Policy: The case of Philippines-China relations since 2004", *S.Rajaratnam School of International Studies Working Paper No. 241*, <http://www.rsis.edu.sg/publications/WorkingPapers/WP241.pdf> (diakses 13 Desember 2013)

¹⁴ Lance Lindauer, "Rational Choice Theory, Grounded Theory, and Their Applicability to Terrorism", *Policy Research Practice, The Heinz Journal Vol 9. Issue 2* (t.t), <http://journal.heinz.cmu.edu/wp-content/uploads/2012/05/Final-Rational-Choice.pdf> (diakses 13 Desember 2013)

keputusan yang diambil dalam satu kesatuan negara. Sebagaimana dijelaskan oleh Molton Halperin dan Priscilla Clapp dengan model *burearatics politics*. Pendekatan tersebut menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dibentuk oleh kepentingan atau prioritas dari perangkat pemerintahan baik secara individu maupun kelompok melalui kelembagaan. Hal ini melingkupi interaksi yang melibatkan sesama badan eksekutif, eksekutif dan legislatif ataupun kepribadian dari masing-masing aktor individual yang terlibat dalam dinamika pembuatan kebijakan.¹⁵ Potensi keuntungan yang lebih besar dari kerjasama dibandingkan dengan bertindak unilateral menjadi motivasi awal negara dan menjadi bagian dari *rational choice*.¹⁶ Sadoff dan Grey mengidentifikasi empat jenis keuntungan kerjasama di sungai internasional yang dicantumkan pada tabel berikut (Tabel 2).

Tabel 2. Jenis Keuntungan dari Kerjasama di Sungai Internasional¹⁷

Type	The Challenge	The Opportunities
Type 1 Increasing Benefits <i>To the River</i>	Degraded water quality, watersheds, wetlands, & biodiversity	Improved water quality, riverflow characteristics, soil conservation, biodiversity and overall sustainability
Type 2 Increasing Benefits <i>From the River</i>	Increasing demands for water, sub-optimal water resources management & development	Improved water resources management for hydropower & agricultural production, flood-drought management, navigation, environmental conservation, water quality & recreation
Type 3 Reducing Costs <i>Because of the River</i>	Tense regional relations & political economy impacts	Policy shift to cooperation & development, away from dispute/conflict; from food (& energy) self-sufficiency to food (& energy) security; reduced dispute/conflict risk & military expenditure
Type 4 Increasing Benefits <i>Beyond the River</i>	Regional fragmentation	Integration of regional infrastructure, markets & trade

¹⁵ Halperin dkk, *Bureaucratic Politics and Foreign Policy*, 317

¹⁶ Claudia W Sadoff dan David Grey, "Cooperation on International Rivers: A Continuum for Securing and Sharing Benefits", 2

¹⁷ Claudia SW Sadoff dan David Grey, "Cooperation on International Rivers: A Continuum for Securing and Sharing Benefits", *International Water Resources Association*, Water International, vol.30, no. 4 (desember 2005), 2

Keterlibatan Aktor-Aktor Domestik Ethiopia dalam Negosiasi Cooperative Framework Agreement (CFA)

Aktor-aktor domestik yang mendominasi negosiasi menuju *Cooperative Framework Agreement* (CFA) adalah aktor eksekutif sedangkan aktor legislatif lebih terspesifik pada peranannya meratifikasi. Sebelum tahun 1997, Ethiopia kurang terlibat dalam negosiasi secara bilateral maupun multilateral. Dimulai dari perjanjian yang melibatkan Mesir dan Inggris pada tahun 1929 serta perjanjian-perjanjian antar- kolonial, perjanjian antara Mesir dan Sudan, hingga kerjasama multilateral yang diusulkan oleh masing-masing negara Lembah Sungai Nil seperti HYDROMET (1970-1993), UNDUGU (1983), TECCONILE (the Technical Cooperation Committee for the Promotion of the Development and Environmental Protections of the Nile) (1993-1999).

Namun setelah tahun 1997, terlihat peningkatan partisipasi Ethiopia dalam negosiasi multilateral di Lembah Sungai Nil. Promosi terhadap prinsip *equitable* dan *reasonable* dalam konsep CFA merupakan salah satu hal yang diperjuangkan oleh Ethiopia ketika terlibat dalam negosiasi.¹⁸ Ethiopia bersama negara Lembah Sungai Nil lainnya juga berpartisipasi aktif dalam dialog *regional partnership* tentang pengembangan dan manajemen yang berkelanjutan sumber daya air di Sungai Nil. Pada tingkat Council of Ministers of Water Affairs on the Nile Basin countries (Nile-COM), Ministry of Water Resources (MoWR) menjadi salah satu aktor yang berperan dalam penyusunan naskah CFA. Selain itu, dalam artikel dari Ministry of Foreign Affairs (MoFA) yang menyebutkan Ethiopia secara aktif berpartisipasi dalam negosiasi multilateral sejak tahun 1993, melalui *Nile Conference*.¹⁹

Secara keseluruhan Ethiopia terlibat dalam negosiasi rutin dilakukan, seperti di Bujumbura (pada Mei 2006), Kigali (pada Februari 2007), Entebbe (Juni 2007), Kinshasa (Mei 2009), Alexandria (Juli 2009) dan terakhir di Sharm El Sheikh (April 2010). Proses penandatanganan CFA dibuka selama setahun sejak pertemuan Nile-COM di Sharm Al Sheikh, Mesir.²⁰ Naskah pertama kali ditandatangani oleh Ethiopia, Uganda, Kenya, Rwanda dan Tanzania disusul oleh Burundi pada Februari 2011.²¹ Bersamaan dengan hal tersebut, pertemuan Nile-COM ke-18,

¹⁸ Anonim, "Ethiopia's Firm Commitment to Cooperation Over the Nile", <http://aigaforum.com/articles/mofa-on-nile-basin.php> (diakses 7 Desember 2013)

¹⁹ Anonim, "Ethiopia's Firm Commitment to Cooperation Over the Nile", <http://aigaforum.com/articles/mofa-on-nile-basin.php> (diakses 7 Desember 2013)

²⁰ Yonas Abiye, "Ethiopia one step closer to ratifying Nile agreement", *The Reporter* (April 2013), <http://www.thereporterethiopia.com/index.php/news-headlines/item/390-ethiopia-one-step-closer-to-ratifying-nile-agreement> (diakses 27 Desember 2013)

²¹ Anonim, "Egypt Resist to Sign Nile Water Agreement", *Middle East Monitor*, 7 Maret 2012, <http://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/3496-egypt-resists-pressure-to-sign-nile-water-agreement> (diakses 7 Desember 2013)

Ministry of Water Resources (MoWE) dari Ethiopia ditunjuk sebagai Ketua Nile-COM untuk periode satu tahun (2010-2011).²²

Selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2013 Ethiopia justru menjadi negara di sungai Nil pertama yang meratifikasi *Nile Water Cooperative Framework Agreement* (CFA) atau *Entebbe Agreement*. Pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara pemerintah Ethiopia kepada media *Agence France Presse*:

“Parliament approved and passed a law that incorporates the treaty into domestic law... the deal replaces the ‘unjust’ agreements of 1929 and 1959 that awarded Sudan and Egypt control of the lion’s share of the river, and the agreement ensures equitable access to Nile waters...Ethiopia has never considered the 1959 (and) 1929 agreements binding, as it has never been a party to it...The CFA is a response to the unjust colonial imposition on the part of the riparian states preventing them from exploiting equitably the Nile resources”.²³

Demokrasi dalam praktiknya di Ethiopia disebut sebagai *restricted democratic practice* yaitu pemerintahan yang masih dikendalikan oleh rezim yang dominan termasuk akses ke media dan dalam proses pemilihan.²⁴ Demikian pula dengan manajemen sumber daya alam masih ditangani secara penuh oleh pemerintah pusat termasuk sumber daya perairan.²⁵ Di Ethiopia, lembaga pemerintahan yang berwenang atas ratifikasi perjanjian internasional termasuk CFA adalah pada tingkat parlemen yakni House of People’s Representative. Ratifikasi dipertimbangkan setelah naskah CFA diterima oleh Nile-COM dari NBI. Parlemen menjadi badan legislatif Ethiopia yang berperan dalam hal peratifikasian perjanjian-perjanjian internasional. Sebelum CFA diratifikasi, pada tatanan eksekutif, MoFA melakukan diskusi dan konsultasi atas konsep CFA yang diselenggarakan oleh Ministry of Water & Energy (MoWE) sebelum dilimpahkan ke parlemen.²⁶ Kemudian ketika naskah CFA berada di tangan parlemen, sebelum meratifikasi terlebih dahulu dilakukan diskusi naskah CFA pada tanggal 18 April 2013. Setelah itu, naskah diserahkan kepada bagian standing committee

²² Nile Basin Initiative, *the news*, (2011),

²³ Naharnet, “Ethiopia Ratifies Nile Share Deal amid Row with Egypt”, *Agence France Presse* (13 Juni 2013), <http://www.naharnet.com/stories/en/86799> (diakses 7 Desember 2013)

²⁴ Tripod, *term and definition of political system*, <http://africanelections.tripod.com/terms.html>, (diakses 30 Desember 2013)

²⁵ Sarah Vaughan & Kjetil Tronvoll, 156

²⁶ Anon, “Ethiopia begins process to ratify framework agreement on Nile” (7 Maret 2013) <http://grandmillenniumdam.net/ethiopia-begins-process-to-ratify-framework-agreement-on-nile/> (diakses 27 Desember 2013)

of Natural Resources and Environmental Protection yang terdapat dalam parlemen untuk dipertimbangkan lebih lanjut.²⁷

Berdasarkan pada aktor domestik Ethiopia yang berperan dalam proses negosiasi dan ratifikasi CFA, terlihat bahwa terdapat dua aktor yang memiliki peran penting, yaitu: MoFA, MoWE pada tingkat eksekutif. MoFA memiliki peran dalam negosiasi-negosiasi baik yang dilakukan secara bilateral maupun multilateral untuk menyampaikan kepentingan Ethiopia terkait pemanfaatan Sungai Nil. Pada tingkat multilateral seperti yang telah dijelaskan sebelumnya adalah berkaitan dengan negosiasi tingkat kementerian di Sungai Nil sedangkan pada tingkat bilateral MoFA juga berperan dalam negosiasi misalnya dengan negara hilir terkait ketidaksepakatan-ketidaksepakatan yang berasal dari naskah CFA. Dengan demikian MoFA lebih banyak berperan sebagai negosiator, sementara dalam lingkup domestik, kementerian ini juga berkonsultasi dengan kementerian-kementerian lain terkait dengan isu yang diangkat misalnya saja dengan MoWE. Sementara itu, MoWE memiliki peran ganda yang penting. Secara regional, MoWE yang tergabung dalam Nile-COM bersama dengan kementerian sumber daya air dari negara memengaruhi Sungai Nil lainnya berperan dalam setiap pertemuan Nile-COM yang diadakan setiap tahun. Melalui pertemuan tersebut, MoWE turut mengambil bagian dalam negosiasi manajemen sumber daya air di Sungai Nil dalam hal legal maupun teknis.

Pada tingkat domestik, MoWE yang memiliki kewenangan mengatur sektor perairan domestik. Dengan demikian, kebijakan sektor perairan pada tingkat regional banyak disebabkan oleh pengelolaan yang dilakukan oleh MoWE. Sementara House of People's Representative berperan pada tahap ratifikasi saja tetapi mempertimbangkan prinsip-prinsip legal dari CFA yang disesuaikan dengan karakteristik domestik. Oleh karena itu, dilihat dari aktor yang berperan dalam ratifikasi CFA, MoWE yang memiliki peran dominan karena selain bernegosiasi juga memperjuangkan kepentingan sektor perairan Ethiopia di Sungai Nil. MoWE atau MoWR sedang gencarnya menjadikan sektor perairan sebagai prioritas dalam kebijakan nasional Ethiopia. Di mana MoWR ini dalam mengembangkan sektor perairan kemudian berinteraksi dengan kementerian lain yang memiliki isu terkait. Namun interaksi dengan kementerian lain menyebabkan sejumlah kementerian atau lembaga lain turut memiliki pengaruh yang kuat dalam sektor perairan di Ethiopia. Hal ini didasarkan pada penelitian Samuel Luzi pada tahun 2007 tentang aktor-aktor domestik yang berpengaruh dalam sektor perairan Ethiopia baik secara domestik maupun regional. Aktor yang mewakili

²⁷ Addis Fortune.com, "Ethiopia: House of People's Representatives Discussed Nile Basin Cooperation Framework Agreement", <http://girumpost.com/?p=2485> (diakses 27 desember 2013)

Ethiopia dalam negosiasi di NBI (*Nile Basin Initiative*) merumuskan konsep CFA adalah MoWR dan MoFA. Sedangkan parlemen yang memiliki hak veto terhadap ratifikasi perjanjian internasional, dibatasi wewenangnya disebabkan oleh mayoritas partai yang menduduki kursi legislatif.²⁸

Seperti dijelaskan sebelumnya, MoWR yang berupaya mengoptimalkan manajemen sumber daya air Ethiopia, menjalin komunikasi dengan kementerian-kementerian lain yang berhubungan dengan isu yang sedang dibahas. Misalnya, dalam isu pengembangan irigasi, MoWR berkomunikasi dengan Ministry of Agriculture and Rural Development (MoARD); dalam isu rencana anggaran pengembangan sumber daya air, MoWR berkomunikasi dengan Ministry of Finance and Economic Development (MoFED); dan isu pembangkit listrik tenaga air, MoWR berkomunikasi dengan Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCO). Sehingga MoWR banyak berperan dalam lingkup domestik untuk mewujudkan pengembangan sumber daya air Ethiopia. Sementara MoFA lebih cenderung terlibat dalam negosiasi di tingkat bilateral dan regional daripada tingkat domestik.²⁹

Integrasi yang kemudian menguatkan sektor perairan Ethiopia adalah ketika terintegrasinya sektor perairan dan energi. Di mana pada tahun 2010, pemerintah Ethiopia kembali mengembangkan sektor perairan dengan mengembangkan MoWR menjadi MoWE. Disebabkan sektor perairan yang menjadi salah satu arena yang dapat digunakan oleh Ethiopia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi menyebabkan MoWE juga memiliki integrasi yang kuat dengan MoFED. Hal tersebut ditunjukkan pada sektor pembangunan energi terspesifik pada pembangkit tenaga listrik. Sebagaimana tujuan utama dari sektor energi adalah menyediakan sumber energi yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi dan sosial seperti halnya dalam aktivitas irigasi.³⁰ Dengan integrasi yang terjalin antar sektor perairan dan energi dan juga sektor finansial menjadikan sektor perairan sebagai salah satu sumber terbesar pertumbuhan ekonomi Ethiopia dalam jangka waktu yang panjang.

²⁸ Samuel Luzi, "Double-Edged Hydropolitics on the Nile: Linkages Between Domestic Water Policy Making and Transboundary Conflict and Cooperation" 129

²⁹ Samuel Luzi, "Double-Edged Hydropolitics on the Nile: Linkages Between Domestic Water Policy Making and Transboundary Conflict and Cooperation", 130

³⁰ Federal Democratic Republic of Ethiopia, *Growth and Transformation Plan (2010/11-2014/15) Annual Progress Report for F.Y. 2010/11*, <http://www.mofed.gov.et/English/Resources/Documents/GTP%20Annual%20progress%20Report%20%282010-11%29.pdf> (diakses 5 Januari 2013)

Nile Basin Cooperative Framework Agreement (CFA) dan Kebutuhan Ekonomi Ethiopia

Berdasarkan jenis keuntungan yang dijelaskan oleh Sadoff dan Grey, jenis keuntungan yang bisa didapatkan Ethiopia dari CFA adalah *benefits from river* dan *benefits beyond the river*. Melalui *benefits froms river* Ethiopia mendapatkan keuntungan ekonomi sementara *benefits beyond the river* Ethiopia berintegrasi dengan negara-negara memengaruhi Sungai Nil lainnya mengurangi biaya untuk mendukung pemanfaatan Sungai Nil dan tetap dapat menjalankan proyek bendungan GERD yang nantinya akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Ethiopia.

Setelah mengalami kemerosotan ekonomi pada awal tahun 2000an sebagai dampak dari konflik Ethiopia dengan Eritrea dan Somalia, perekonomian Ethiopia mulai mengalami pertumbuhan sebagai wujud tanggung jawab pemerintahan Meles Zenawi dalam meningkatkan performa ekonomi Ethiopia.³¹ Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah Ethiopia mulai memprioritaskan pengembangan kebijakan sumber daya air. Namun sejumlah proyek pengembangan sumber daya air telah direncanakan oleh Ethiopia pada tahun 1990an namun karena keterbatasan ekonomi dan instabilitas politik menyebabkan rencana tersebut belum dapat diimplementasikan.³² Dengan demikian kebijakan pemerintah Ethiopia berupaya untuk meningkatkan perekonomian dengan cara meningkatkan pengembangan sumber daya air sebagai prioritas utama. Sumber daya air Sungai Nil menjadi salah satu fokus utama pemerintah Ethiopia dalam pengembangan sektor air.

MoWR pada tahun 2001 menyatakan strategi kebijakan air Ethiopia tertuju pada:³³

“to enhance and promote all national efforts towards the efficient, equitable, and optimum utilisation of the available water resources of Ethiopia for significant socio-economic development in sustainable basis”.

MoWR juga melakukan reformasi agenda sebagai berikut: pertama, perumusan kebijakan manajemen sumber daya air Ethiopia yang pertama kali ditetapkan pada tahun 1999, terkait isu seperti pasokan air bersih dan sanitasi, irigasi, pembangkit listrik tenaga air dan

³¹ Jakob Granit, Ana Cascao, dkk, “The Nile Basin and the Southern Sudan Referendum” *Regional Water Intelligence Report, paper 18*, Stockholm (desember 2010)

³² Simon A. Mason, “From Conflict to Cooperation in the Nile Basin”, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, 2003

³³ MoWR (2001) dalam Serihun Abebe Yigzaw, hal 79.

konservasi..³⁴ Kedua, *Water Resources Management Proclamation* No. 197 tahun 2000 diterbitkan oleh Parlemen. Ketiga, Strategi sektor perairan Ethiopia tahun 2001 diterima dan disahkan sebagai dokumen nasional. Keempat, ditetapkannya Rencana 15 tahun (2002-2016) Program Pengembangan Sektor Perairan Ethiopia. Kelima, ditetapkannya *Water Resources Development Fund* pada tahun 2002 sebagai langkah penting mendukung implementasi program 15 tahun. Keenam, keterlibatan Ethiopia sebagai aktor penting dalam memajemen alokasi perairan lintas batas dalam kerangka *Nile Basin Initiative* (NBI). Ketujuh, tercetusnya *Water Supply and Sanitation Master Plan* untuk proses pembangunan jangka panjang terkait air bersih dan sanitasi. Kemudian terbentuknya *River Basin Master Plan Studies* berkaitan dengan aliran sungai utama Ethiopia seperti Abbay (Nil Biru), Tekeze dan Baro-Akobo.³⁵ Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tersebut didasarkan pada prinsip *Integrated Water Resources Management* yaitu kebijakan yang memperhatikan beberapa isu sekaligus seperti isu pengadaan air bersih dan saniitasi, irigasi, sumber tenaga listrik dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).³⁶ Dari kedelapan agenda reformasi sektor perairan, *Water Sector Development Program* (WSDP) tahun 2002-2016 menjadi *road map* utama pemerintah Ethiopia memanfaatkan sumber daya air untuk keperluan irigasi dan *hydropower*.³⁷

Kebijakan air Ethiopia memiliki prinsip fundamental nasional, yakni air adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh rakyat Ethiopia secara bersama-sama sehingga seluruh warga negara Ethiopia berhak mengakses konsumsi air untuk memenuhi kebutuhan dasar.³⁸ Selain itu, air dianggap memiliki nilai ekonomi dan sosial sehingga manajemen air harus menjamin kesetaraan sosial dan efisiensi ekonomis.³⁹ Terdapat empat hal utama yang ditekankan oleh MoWR dalam kebijakan di *transboundary waters*, yaitu: pertama, mengembangkan pembangunan di wilayah *transboundary waters* berdasarkan kepentingan nasional Ethiopia dan mempertimbangkan perjanjian-perjanjian internasional yang dapat dilakukan secara unilateral atau multilateral. Kedua,

³⁴ Samuel Luzi, "Double-Edged Hydropolitics on the Nile: Linkages Between Domestic Water Policy Making and Transboundary Conflict and Cooperation", hal. 143

³⁵ Anonim, *Role and mandate of the Ministry of Water Resources* (t.t), <http://ilri.org/infoserv/Webpub/fulldocs/IntegratedWater/IWMI/Documents/roleandmandate.htm> (diakses 18 Desember 2013)

³⁶ Samuel Luzi, "Double-Edged Hydropolitics on the Nile: Linkages Between Domestic Water Policy Making and Transboundary Conflict and Cooperation" hal. 126

³⁷ Semu Moges, Helmut Kloos, Stuart McFeeters dan Worku Legesse, "Chapter 3: The water Resources of Ethiopia and Large-Scale Hydropower and Irrigation Development" dalam Helmut Kloos & Worku Legesse, *Water Resources management in Ethiopia: Implication for the Nile Basin*, Cambria Press (2010)

³⁸ Ministry of Water Resources, The Federal Democratic Republic of Ethiopia, "Ethiopian Water Sector Strategy" final draft (2001), hal. 2

³⁹ Ministry of Water Resources, The Federal Democratic Republic of Ethiopia, hal. 2

melakukan peninjauan dan pembaharuan masalah teknis berupa pengukuran endapan arus dan kualitas air secara reguler. Ketiga, peninjauan dilakukan setiap lima tahun sekali, jika permintaan melebihi estimasi maka dilakukan transfer dari aliran sungai lain untuk memenuhi kekurangan tersebut. Keempat, mengidentifikasi pengembangan pembangunan yang dilakukan secara bersama-sama dengan negara memengaruhi sungai dengan memperhatikan kepentingan Ethiopia. Kerjasama dapat dilakukan dalam pengembangan irigasi dan *hydropower*. Kelima, memajukan kemampuan negosiasi di perbatasan dan juga resolusi konflik serta meningkatkan kesadaran publik terhadap isu-isu perbatasan.⁴⁰

Pada tahun 2007, MoWR yang berganti menjadi MoWE menetapkan dewan yang bertugas mengkoordinasi memengaruhi sungai Nil utama. Sebagaimana disebutkan: “*A new ministry was created merging Water Resources and Energy in these mecabinet... indicated priority given to hydropower development in Ethiopia*”.⁴¹ Selanjutnya melalui integrasi sektor perairan dan sektor energi dalam MoWE pada tahun 2010, sektor perairan Ethiopia banyak difokuskan pada pembangunan *hydropower* yang didasarkan pada *Hydropower for Sustainable Development* tahun 2011.

Ethiopia tetap menjadi salah satu negara termiskin di dunia dengan GDP (*Gross Domestic Product*) per kapita hanya sebesar US\$471 (2012).⁴² Sekitar 38 persen dari 80 juta penduduk Ethiopia, masih hidup dalam kemiskinan dengan pendapatan di bawah \$1,25 per hari.⁴³ Aktivitas perekonomian Ethiopia masih bergantung pada sektor pertanian. sekitar 47,7 persen dari total GDP didominasi oleh sektor pertanian.⁴⁴ Sementara itu, jumlah populasi Sungai Nil termasuk Ethiopia terus mengalami peningkatan dengan angka kelahiran empat anak per wanita.⁴⁵ Melihat kondisi tersebut, pertanian tidak lagi bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan generasi berikutnya. Industrialisasi dan urbanisasi menjadi kunci utama yang dapat menyediakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran

⁴⁰ Ministry of Water Resources, The Federal Democratic Republic of Ethiopia, 8-9

⁴¹ Jakob Granit, Ana Cascao, dkk, “The Nile Basin and the Southern Sudan Referendum” *Regional Water Intelligence Report, paper 18*, Stockholm desember 2010, http://www.siri.org/documents/Resources/Papers/Paper18_RWIR_Nile_Basin.pdf

⁴² “Ethiopia”, *Feed the Future: U.S. Government’s Global Hunger and Food Security Initiative Website*, <http://www.feedthefuture.gov/country/ethiopia> (diakses 7 Desember 2013)

⁴³ “Ethiopia”, *Feed the Future*

⁴⁴ Seleshi Bekele Awulachew dkk, “Water Resources and Irrigation Development in Ethiopia”, *working paper 123*, <http://www.ldeo.columbia.edu/users/menke/data/ethiopia/WP123.pdf>, hal. 16 (diakses 19 Desember 2013)

⁴⁵ Carolyn Lamere, “Nile Basin at a Turning Point as Political Changes Roil Balance of Power and Competing Demands Proliferate”, *New Security Beat*, 4 September 2012, <http://www.newsecuritybeat.org/2012/09/nile-basin-turning-point-egyptian-revolution-roils-balance-power-competing-demands-proliferate/#.UtGMjftuuHF> (diakses 6 Januari 2014)

negara tersebut di tengah meningkatnya populasi.⁴⁶ Kunci untuk mencapai industrialisasi adalah ketersediaan energi yang cukup. Pemerintah Ethiopia berupaya mengurangi angka kemiskinan dengan membangun infrastruktur publik seperti pembangkit tenaga listrik untuk aktivitas industri dan kebutuhan irigasi.

Berdasarkan tingkat kategori kelangkaan dari PBB, Ethiopia berada pada tingkat *economic water scarcity* bersama dengan negara-negara lainnya yang ada di memengaruhi Sungai Nil. Dengan kata lain, Ethiopia dengan keterbatasan kapasitas ekonomi menyebabkan keterbatasan untuk mengakses Sungai Nil. Namun dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan Ethiopia kemudian memanfaatkan kondisi tersebut untuk meningkatkan akses dari Sungai Nil.

Whittington menguraikan empat tekanan ekonomi yang ada di Sungai Nil, diantaranya:⁴⁷

Pertama, *'using the water upstream, instead of losing it by evaporation'*, hal ini didasarkan pada konsep bahwa jika air tidak dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi maka air akan hilang begitu saja oleh karena proses evaporasi yang terjadi.

Kedua, *'opportunity cost option: downstream countries would withdraw water for irrigation, while upstream countries use it for hydropower'* yang didasarkan pada konsep perdagangan bahwa negara-negara hulu dapat menggunakan air untuk pembangkit *hydropower* dengan kapasitas penyimpanan air minimum sebelum mengalir menuju negara hilir yang dapat mereka gunakan untuk pengembangan irigasi.

Ketiga, *'store water upstream to reduce evaporation losses'*, yang berasumsikan bahwa penampungan air lebih tepat dibangun di negara hulu dibandingkan negara hilir karena dengan adanya penampungan air di negara hulu hal ini akan mengurangi terjadinya evaporasi.

Keempat, *'withdraw water where it is used value is greatest'* yang beranggapan bahwa negara yang memiliki kontribusi aliran air ke Sungai Nil paling banyak yang memiliki hak untuk menggunakan air. Dari keempat asumsi di atas, asumsi kedua yang mewakili keinginan Ethiopia untuk memaksimalkan penggunaan Sungai Nil untuk tujuan ekonomi yang selama ini dihalangi oleh perjanjian 1959. Demikian pula

⁴⁶ Seifulaziz Milas, "Ethiopia: Nile Waters Diplomacy and the Renaissance Dam", *African Arguments*, 3 Oktober 2012, <http://africanarguments.org/2012/10/03/ethiopia-nile-waters-diplomacy-and-the-renaissance-dam-%E2%80%93-by-seifulaziz-milas/> (diakses 6 Januari 2014)

⁴⁷ Dale Whittington, Xun Wu dan Claudia Sadoff, "Water Resources Management in the Nile Basin: the Economic Value of Cooperation", *Water Policy* 7 (2005), 231-236

yang diuraikan oleh Gleick terkait faktor-faktor yang menciptakan kerentanan interaksi di perairan internasional atau *transboundary river* sebagai berikut: pertama, peningkatan rasio permintaan air terhadap persediaan air; kedua, pemenuhan kebutuhan air yang dihitung per orang; ketiga, terpecahnya pasokan air dari luar batas negara; dan keempat, ketergantungan hidroelektrik yang terpengaruh dari pasokan air dari luar yang semakin berkurang.

Berdasarkan *Interconnected System* (ICS), potensi *hydropower* Ethiopia mencapai 650 terrawatt per jam. Potensi tersebut juga didukung oleh curah hujan yang tinggi dan titik jatuh elevasi air yang mengalir juga tinggi.⁴⁸ Sementara itu, pemerintah Ethiopia pada tahun 2006 menyadari terjadinya kelangkaan tenaga listrik dan hal ini menjadi peran MoFED untuk mengembangkan *hydropower* nasional.⁴⁹ *Hydropower* yang telah dibangun oleh Ethiopia jauh tertinggal dari Mesir yaitu hanya sebesar 410 megawatt dibandingkan dengan Mesir sebesar 2845 megawatt (data tahun 2001). Namun potensi *hydropower* jika dibandingkan dengan Mesir sebesar sepuluh kali lipat. Hal ini ditunjukkan pada tabel di bawah (tabel 3).

Tabel 3. Perbandingan Potensi *Hydropower* Negara-negara Memengaruhi Sungai Nil⁵⁰

Potential hydroelectric power Generation (Mason,2001)			
Country	Installed Hydropower (MW)	Potential Hydropower (MW)	% of the Installed hydropower from the potential hydropower
Burundi	41	161	25.47%
DR Congo	23.1	2600	0.89%
Egypt	2,845	2983	95.37%
Ethiopia	410	30,000	1.37%
Kenya	2	357	0.56%
Rwanda	34	155	21.94%
Sudan	238	1618	14.71%
Tanzania	337	4837	6.97%
Uganda	180	5000	3.60%

Table 6: Potential Hydroelectric Power generation in the Nile Basin countries (Mason, 2001)

⁴⁸ Semu Moges, Helmut Kloos, Stuart McFeeters dan Worku Legesse, "Chapter 3: The water Resources of Ethiopia and Large-Scale Hydropower and Irrigation Development"

⁴⁹ Seleshi Bekele Awulachew dkk, 17

⁵⁰ Kareem Mohamed Abdel Sattar Abdel Monem, "Political, technical and economical context of the Government of Egypt's approaches towards the Nile Basin Countries", tesis pada School of Global Affairs and Public Policy pada American University, 2011

Keinginan Ethiopia untuk membangun bendungan melalui aliran Sungai Nil Biru sudah ada sejak tahun 1956-1964 melalui *Abbay Master Plan*, ketika US Bureau Reclamation melakukan penelitian terkait potensi Sungai Nil Biru.⁵¹ Berikut daftar bendungan yang yang diproyekkan oleh Ethiopia.

Tabel 4. Daftar Proyek Bendungan Pemerintah Ethiopia⁵²

Nama Bendungan	Nama Sungai	Tahun Proyek Selesai	Kapasitas (megawatt)
Fincha Dam	Fincha	1973	100
Melka Wekena Dam	-	1989	153
Sor Dam	-	1990	5
Tis Abay II	Abbay	2001	75
Gilgel Gibe I	Omo	2004	184
Tekeze High Dam	Tekeze	2009	310
Gilgel Gibe II	Omo	2009	420
Tana Beles	Belesa	2010	435
Gilgel Giber III	Omo	2013	1870
Great Millennium Dam	Abbay	2017	5250
Ashegoda Wind Farm Project	Enderta	2011	120

Kepentingan Ethiopia meningkatkan perekonomian domestik menjadi bagian dari tindakan unilateral Ethiopia. GERD, salah satu proyek yang mendapat penentangan dari negara hilir menjadi dilema tersendiri bagi Ethiopia. Ketika Ethiopia melanjutkan proyek bendungan GERD secara unilateral tanpa didasarkan pada kerangka resmi dalam bentuk perjanjian maka Ethiopia akan terus mendapatkan hambatan dari negara hilir yang berupaya membatalkan pembangunan bendungan. Sementara itu, dilihat dengan parameter Ethiopia sebagai negara hulu dan Mesir sebagai negara hilir, tindakan unilateral untuk tetap mengoptimalkan Sungai Nil Biru tidak memiliki kapasitas yang cukup kuat kecuali didasarkan pada letak geografis Ethiopia yang berkontribusi besar terhadap aliran air Sungai Nil.

Sedangkan dalam ekonomi dan kekuatan militer, Ethiopia belum memiliki kapasitas tersebut yang akan dijadikan sebagai alat menghadapi negara hilir yang menentang pembangunan bendungan di Sungai Nil Biru dan akan berujung pada konflik yang merugikan. Satu-

⁵¹ Consulate General Ethiopia Los Angeles, *Grand Ethiopian Renaissance Dam*, hal. 2

⁵² Tigray Online, "Ethiopia's hydroelectric power through the past 70 years" (17 April 2011), <http://www.tigraionline.com/articles/article110453.html> (diakses 4 Januari 2014)

satunya cara yang dapat dilakukan oleh Ethiopia untuk memaksimalkan pembangunan *hydropower* di Sungai Nil adalah dengan mengemas tindakan unilateral Ethiopia melalui dukungan kerjasama multilateral yang mendasarkan pada prinsip *equitable* dan *reasonable*. Sebagai negara pertama meratifikasi CFA, hal ini akan dijadikan oleh pemerintah Ethiopia sebagai dasar legal Ethiopia memanfaatkan Sungai Nil Biru tanpa harus berurusan dengan negara-negara hilir untuk mengerjakan rencana unilateral Ethiopia membangun *hydropower*. Dengan demikian, jenis kepentingan nasional yang diperjuangkan oleh Ethiopia adalah kepentingan tujuan jangka menengah yang sifatnya memaksa pihak lain melalui komitmen untuk memenuhi tuntutan ekonomi.

Kesimpulan

Kebijakan luar negeri Ethiopia meratifikasi *Nile Basin* CFA didorong oleh peran aktif Ethiopia dalam negosiasi *Nile Basin* CFA yang telah berlangsung sejak tahun 1997. Peran tersebut terutama dijalankan oleh MoWE dan MoFA. Keterlibatan MoWE mengarahkan sektor perairan sebagai *leading sectors* dalam ratifikasi CFA yang diprioritaskan untuk memenuhi desakan ekonomi Ethiopia sebagai faktor kedua Ethiopia meratifikasi CFA. Signifikansi potensi aliran Sungai Nil untuk pengembangan sektor perairan melalui pembangunan *hydropower* menjadi kunci untuk menjawab kondisi permintaan secara ekonomi yang meningkat seiring dengan peningkatan populasi. CFA yang menentang tindakan unilateral menyebabkan Ethiopia harus mengarahkan proyek unilateralnya menjadi multilateral untuk mendapatkan dukungan memenuhi desakan ekonomi domestik. Dengan demikian Ethiopia memiliki hak legitimasi pemanfaatan aliran Sungai Nil. Dua faktor di atas menunjukkan bahwa hal yang mendorong ratifikasi *Nile Basin* oleh Ethiopia adalah kombinasi antara keterlibatan aktor-aktor yang mewakili Ethiopia pada tingkat multilateral dan kondisi ekonomi Ethiopia yang mendesak.

Daftar Pustaka

Buku

- Coplin, William D. *Introduction to International Politics: A Theoretical Overview*.)Boston: Markham College Publishing, 1974)
Halperin, Morton H dkk, *Bureaucratic Politics and Foreign Policy* (Washington DC: Brooking Institution Press, 2006)

Holsti, K.J, *Politik Internasional, Kerangka untuk Analisis*. (Jakarta: Erlangga, 1988)

Spanier John, *Games Nations Play: Analyzing International Politics*. (New York: Congressional Quarterly 1981)

Internet

Abiye, Yones, "Draft Nile Basin Framework Agreement Under Consideration in Ethiopia's Parliament", *The Ethiopia Observatory*, 21 April 2013, <http://ethiopiaobservatory.com/2013/04/24/draft-nile-basin-framework-agreement-under-consideration-in-ethiopia-parliament/> (diakses 16 Desember 2013)

Addis Fortune.com, "Ethiopia: House of People's Representatives Discussed Nile Basin Cooperation Framework Agreement", <http://girumpost.com/?p=2485> (diakses 27 desember 2013)

Anonim, "Ethiopia's Firm Commitment to Cooperation Over the Nile", <http://aigaforum.com/articles/mofa-on-nile-basin.php> (diakses 7 Desember 2013)

Anonim, *Role and mandate of the Ministry of Water Resources* (t.t), <http://ilri.org/infoserv/Webpub/fulldocs/IntegratedWater/IWMI/Documents/roleandmandate.htm> (diakses 18 Desember 2013)

Arsano, Yacob, "Ethiopia and the Nile: Dilemmas of National and Regional Hydropolitics", *graduate's thesis of Center for Security Studies, Swiss Federal Institute of Technology* (2007). www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Ethiopia-and-the-Nile.pdf (diakses 2 Mei 2013)

Baviera, Aileen S.P., "The Influence of Domestic Politics on Philippines Foreign Policy: The case of Philippines-China relations since 2004", *S.Rajaratnam School of International Studies Working Paper No. 241* (Juni 2012). <http://www.rsis.edu.sg/publications/WorkingPapers/WP241.pdf> (diakses 13 Desember 2013)

Bitsue, Kidane Kiros, "The Nile From Mistrust and Sabre Rattling to Rapprochement", *Institute for Security Studies Paper 238* (September 2012). <http://www.issafrica.org/uploads/Paper238.pdf> (diakses 8 Desember 2013)

Cascao, Ana Elisa, "Hydropolitics in the Nile Basin", presentasi pada *Stockholm International Water Institute* (7 November 2011), <http://www.slideshare.net/ana.cascao/nile-hydropolitics-in-the-nile-basin-aalto-university> (diakses 6 Desember 2013)

"Ethiopia", *Feed the Future: U.S. Government's Global Hunger and Food Security Initiative Website*, <http://www.feedthefuture.gov/country/ethiopia> (diakses 7 Desember 2013)

Federal Democratic Republic of Ethiopia, *Growth and Transformation Plan (2010/11-2014/15) Annual Progress Report for F.Y. 2010/11*,

- <http://www.mofed.gov.et/English/Resources/Documents/GTP%20Annual%20progress%20Report%20%282010-11%29.pdf> (diakses 5 Januari 2013)
- Ibrahim, Abadir M, "The Nile Basin Cooperative Framework Agreement: The Beginning of the End of Egyptian Hydro-Political Hegemony", *Environmental Law and Policy Review*, Vol. 18, No. 2 (t.t), 284-312.
- Lamere, Carolyn, "Nile Basin at a Turning Point as Political Changes Roil Balance of Power and Competing Demands Proliferate", *New Security Beat*, 4 September 2012, <http://www.newsecuritybeat.org/2012/09/nile-basin-turning-point-egyptian-revolution-roils-balance-power-competing-demands-proliferate/#.UtGMjftuuHF> (diakses 6 Januari 2014)
- Lindauer, Lance, "Rational Choice Theory, Grounded Theory, and Their Applicability to Terrorism", *Policy Research Practice, The Heinz Journal* Vol 9. Issue 2 (t.t). <http://journal.heinz.cmu.edu/wp-content/uploads/2012/05/Final-Rational-Choice.pdf> (diakses 13 Desember 2013)
- Luzi, Samuel, "Double-Edged Hydropolitics on the Nile: Linkages Between Domestic Water Policy Making and Transboundary Conflict and Cooperation" *postgraduate's dissertation of Institute of Technology Zurich* (2008), www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Hydropolitics-Nile.pdf (diakses 3 Oktober 2013)
- Mason A. Imon, "From Conflict to Cooperation in the Nile Basin", Swiss Federal Institute of Technology Zurich, 2003
- Mekonnen, Dereje Zeleke, "The Nile Basin Cooperative Framework Agreement Negotiations and the Adoption of a 'Water Security' Paradigm: Flight into Obscurity or a Logical Cul-de-sac?" *The European of International Law* Vol. 21 No. 2 (2010), www.ejil.org/pdfs/21/2/2014.pdf (diakses 9 Desember 2013)
- Ministry of Water Resources, The Federal Democratic Republic of Ethiopia, "Ethiopian Water Sector Strategy" final draft (2001)
- Milas, Seifulaziz, "Ethiopia: Nile Waters Diplomacy and the Renaissance Dam", *African Arguments*, 3 Oktober 2012, <http://africanarguments.org/2012/10/03/ethiopia-nile-waters-diplomacy-and-the-renaissance-dam-%E2%80%93-by-seifulaziz-milas/> (diakses 6 Januari 2014)
- Monem, Kareem Mohamed Abdel Sattar Abdel "Political, technical and economical context of the Government of Egypt's approaches towards the Nile Basin Countries", tesis pada School of Global Affairs and Public Policy pada American University, 2011
- Naharnet, "Ethiopia Ratifies Nile Share Deal amid Row with Egypt", *Agence France Presse*, 13 Juni 2013, <http://www.naharnet.com/stories/en/86799> (diakses 7 Desember 2013)

- Sadoff, Claudia W dan David Grey, "Cooperation on International Rivers: A Continuum for Securing and Sharing Benefits", *International Water Resources Association, Water International*, Vol.30, No. 4 (Desember 2005)
- Semu Moges, Helmut Kloos, Stuart McFeeters dan Worku Legesse, "Chapter 3: The water Resources of Ethiopia and Large-Scale Hydropower and Irrigation Development" dalam Helmut Kloos & Worku Legesse, *Water Resources management in Ethiopia: Implication for the Nile Basin*, Cambria Press (2010)
- "The Ethiopia Parliament Ratifies the Nile Basin Cooperative Framework Agreement (Jun 13, 2013)", *Ministry of Foreign Affairs FDRE Website*, 13 Juni 2013, <http://www.mfa.gov.et/news/more.php?newsid=2120> (diakses 6 Desember 2013)
- The Nile Cooperative Framework Agreement Proclamation Sent to Parliament for Ratification", *Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Stockholm, Sweden*, 12 Juli 2013, <http://ethemb.se/beta/a/the-nile-cooperative-framework-agreement-proclamation-sent-to-parliament-for-ratification-apr-09-2013/> (diakses 6 Desember 2013)
- Tigrai Online, "Ethiopia's hydroelectric power through the past 70 years" (17 April 2011), <http://www.tigraionline.com/articles/article110453.html> (diakses 4 Januari 2014)
- Tripod, *term and definition of political system*, <http://africanelections.tripod.com/terms.html>, (diakses 30 Desember 2013)
- Whittington, Dale dkk, "water Resources Management in the Nile Basin: the Economic Value of Cooperation", *Water Policy* 7, (2005), 227-252